BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam Pengaturan ini masih terdapat Plt. Yang tidak sesuai dalam lingkungan kerjanya, beberapa permasalahan seperti masih adanya Plt. yang belum menjalankan tugasnya dengan baik sehingga tidak memberikan perubahan bagi daerah yang dipimpin, serta kesalahan dalam pembentukan kebijakan yang justru melanggar Batasan kewenangan, dikarenakan peraturan belum memadai, belum ada nya aturan yang jelas dan yang fokus untuk mengatur kewenangan Plt. ini.
2. Batasan-batasan kewenangan Plt. Bupati/Walikota dalam sistem pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum dijelaskan secara terperinci dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, melainkan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, SK BKN 26/2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008. Dari beberapa peraturan perundang-undangan tersebut, maka Batasan kewenangan Plt. Bupati dalam sistem pemerintahan daerah adalah hanya bersifat administratif seperti menandatangani dokumen yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh Bupati dan/atau tugas administratif lainnya serta melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh Bupati definitif.

B. Saran

1. Pelaksanaan sistem pemerintahan daerah oleh Plt. Bupati/Walikota masih perlu pengaturan lebih lanjut terutama mengenai pengaturan batasan kewenangan karena menyebabkan Plt. kurang berfungsi sebagaimana mestinya.
2. Perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai Batasan kewenangan yang dimiliki oleh Plt. Bupati/walikota dalam peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah.